

el-Ijtima'

Media Komunikasi Pengembangan Masyarakat Madani

- Peranan Pendidikan dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia di Era Otonomi Daerah
Nur Syam
- Kajian Sosiologi Makna Pendidikan Bagi Penanaman Nilai-Nilai Budaya Bangsa
Basrowi dan Ajat Sudrajat
- Signifikansi Manajemen Kelembagaan Bagi Organisasi Dakwah
Imas Maesaroh
- Kebijakan Peningkatan Peran Perempuan dan Pentingnya Gender Analisis dalam Strategi Pembangunan di Era Otonomi Daerah: Telaah Terhadap Produksi Lokal dalam Pemerintahan Otonomi Daerah
H. Muhammad Yazid
- Pemikiran Konstruktivistik dalam Teknologi Pembelajaran PAI: Pendidikan Agama Islam
Evi Fatimatur Rusydiyah
- Resolusi Konflik Bagi Masyarakat Berbasis Peradaban Bangsa
Achmad Yasin
- Pentingnya Materi Fiqh Muqoron (Fiqh Perbandingan Mazhab) dalam Kurikulum Bidang Studi Fiqh (Bab Ibadah) untuk Siswa Kelas Satu Madrasah Aliyah
H. Abbas Arfan
- Penyebab dan Penyembuh Sakit: Sebuah Perubahan Pandangan Masyarakat, Kajian Etnolinguistik
Asep Abbas Abdullah

Diterbitkan Oleh:
Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat
IAIN Sunan Ampel
2006

el-Ijtima'

Media Komunikasi Pengembangan Masyarakat Madani

Jurnal el-Ijtima' ini merupakan media informasi komunikasi pemberdayaan dan pengembangan masyarakat. Oleh karena itu semua artikel dalam format kajian ilmiah, action research, applied research, temuan-temuan pengembangan wilayah terpadu, hasil pengabdian di bidang teknologi tepat guna terapan dan metode pengembangan masyarakat harus relevan dengan visi dan misi jurnal ini. Penulis dapat menggunakan perspektif sosial-keagamaan, seni-budaya, ekonomi, politik, hukum, pendidikan, ekologi.

Pembina

H. M. Ridlwan Nasir

Penanggung Jawab

H. Thoha Hamim

Pengarah

H. Nur Syam

Hj. Shofiyah Asmu

Pemimpin Redaksi

H. A. Isa Anshori

Penyunting

H. Suis Qo'im Abdullah

H. Saiful Jazil

Abd. Basith Junaedy

Abd. Kholik

Asep Abbas Abdullah

Hadi Susanto

Penyunting Ahli

H. Syafiq A. Mughni

H. Ali Aziz

Aminuddin Kasdi

Staf Redaksi

Luthfi Aminah

Ikhwani Piyantono

Djoko Siswoyo

Emi Tyartiyani

Sahuri

Ali Mustofa

Muayyadatul Masrury

Mohammad Nasir

Jurnal ini diterbitkan dua kali setahun oleh Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Sunan Ampel di bawah pembina: Prof. Dr. H. M. Ridlwan Nasir, MA.; Penanggung Jawab: Dr. H. Thoha Hamim, MA.; Pengarah: Drs. H. Nur Syam, M.Si., Hj. Shofiyah Asmu

Daftar Isi

Daftar Isi (i)

Dari Redaksi (ii)

- ❖ Peranan Pendidikan dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia di Era Otonomi Daerah
Nur Syam (1-10)
- ❖ Kajian Sosiologi Makna Pendidikan Bagi Penanaman Nilai-Nilai Budaya Bangsa
Basrowid dan Ajat Sudrajat (11-27)
- ❖ Signifikansi Manajemen Kelembagaan Bagi Organisasi Dakwah
Imas Maesaroh (28-35)
- ❖ Kebijakan Peningkatan Peran Perempuan dan Pentingnya Gender Analisis dalam Strategi Pembangunan di Era Otonomi Daerah: Telaah Terhadap Produksi Lokal dalam Pemerintahan Otonomi Daerah
H. Muhammad Yazid (36-47)
- ❖ Pemikiran Konstruktivistik dalam Teknologi Pembelajaran PAI: Pendidikan Agama Islam
Evi Fatimatur Rusydiyah (48-61)
- ❖ Resolusi Konflik Bagi Masyarakat Berbasis Peradaban Bangsa
Achmad Yasin (62-74)
- ❖ Pentingnya Materi Fiqh Muqoron (Fiqh Perbandingan Mazhab) dalam Kurikulum Bidang Studi Fiqh (Bab Ibadah) untuk Siswa Kelas Satu Madrasah Aliyah.
H. Abbas Arfan (75-84)
- ❖ Penyebab dan Penyembuh Sakit: Sebuah Perubahan Pandangan Masyarakat, Kajian Etnolinguistik
Asep Abbas Abdullah (85-93)

KAJIAN SOSIOLOGI MAKNA PENDIDIKAN BAGI PENANAMAN NILAI-NILAI BUDAYA BANGSA

Basrowi¹ dan Ajat Sudrajat²

Abstract: Education and morality represent the very valuable investment to mankind civilization. At the same time, education and morality also represent the very required pillar to evocation and progress of the nation. Through the education and morality, prestige of the nation will be allowed the release of. This article will try to trace the position two this fundamental matter in its bearing with the journey of Indonesian nation history. In tracing important meaning of education and morality in long history of Indonesia, this writing use the critical analytical approach. Such approach follows some step. That steps cover the description, studying, critical, and conclude. Through the approach, inferential several things. *First*, education and morality represent two very pillars for firmness and its sturdy of the nation. Education is a long process in order to sending its human being to become a having the power of intellectual, spiritual, and morality at the same time. *Second*, moral crisis as a whole will very endangering the continuity of the nation. That dangers for example corrupt and gluttonous cultural appearance. *Third*, the duty of brain and moral clarification is responsibility of all. But that, educator specifically have the specialized task, that is searching solution and show its ability to see the reality of nation through the education process.

Keyword: Education, Morality Nation.

Pendahuluan

Pendidikan dan HAM adalah dua pilar yang sangat penting bagi teguh dan kokohnya suatu bangsa. Dua pilar ini menuntut untuk dicerna dan dicermati dengan arif oleh segenap anak bangsa. Dalam suatu negara yang sedang berusaha lepas dari badai krisis, sangatlah tepat apabila kita mencoba

¹ Basrowi adalah Dosen Sosiologi Pendidikan FKIP Universitas Lampung.

² Ajat Sudrajat adalah Dosen pada Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan UPT MKU Universitas Negeri Yogyakarta.

untuk melihat kembali posisi dan interelasi dua pilar ini bagi bangsa Indonesia.

Uraian berikut akan mencoba menelusuri posisi pendidikan dan HAM dalam bingkai kehidupan kebangsaan kita. Dengan menempatkannya pada posisi yang tepat, diharapkan bisa mengantarkan kita untuk menemukan jalan yang lurus, *shirat al-mustaqim*. Jalan yang akan dapat membuka mata hati dan kesadaran kemanusiaan kita sebagai anak-anak bangsa. Sehingga krisis yang hampir saja menghempaskan kita ke jurang kebangkrutan dan kehancuran, dengan segera dapat dilalui dan cepat berlalu.

Negara dan Masalah Pendidikan

Pendidikan, demikian dikatakan al-Gazali, pada hakekatnya adalah usaha mempersiapkan anak-anak dan pemuda untuk menyambut zaman yang akan datang, dengan memberinya ilmu pengetahuan dan memberanikan hatinya untuk memenuhi tuntutan zamannya itu nanti. Karena itu, pendidikan merupakan unsur yang terpenting untuk membina suatu masyarakat (Ahmad, 1975:13).

Sejalan dengan pernyataan tersebut, pendidikan adalah suatu proses panjang dalam rangka mengantarkan manusia untuk menjadi seorang yang memiliki kekuatan intelektual dan spiritual, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidupnya di segala aspek dan menjalani kehidupan yang bercita-cita dan bertujuan pasti. Hal ini menjadi suatu garisan pokok dalam setiap proses didik yang dijalani seseorang (Maarif, 1997:63).

Dilihat dari segi sejarah, pendidikan merupakan suatu gerakan yang telah berumur sangat tua. Dalam bentuk yang sederhana dapat dipahami bahwa pendidikan telah dijalankan sejak dimulainya kehidupan manusia di muka bumi. Untuk era generasi manusia abad 21, pendidikan yang berlangsung telah demikian modern, sehingga sangat membedakannya dengan proses pendidikan yang pernah berlangsung sebelumnya. Realita ini tentu tidak bisa dilepaskan dari keterkaitan manusia dengan perubahan-prubahan atas dasar pengalaman-pengalaman yang dilaluinya.

Lebih lanjut dijelaskan, siapapun tidak akan pernah bisa membantah tentang pentingnya posisi pendidikan. Kemajuan dan kemunduran suatu bangsa antara lain sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan bangsa yang bersangkutan. Tingkat pendidikan yang dicapai suatu bangsa akan

menempatkan bangsa itu pada suatu posisi tertentu dalam hubungannya dengan bangsa-bangsa lain. Pada saat yang bersamaan, pendidikan akan mengantarkan para pemiliknya pada suatu peradaban tertentu. Bukankah tahap-tahap perkembangan peradaban manusia dari satu waktu ke waktu yang lain berkorelasi signifikan dengan tingkat pengetahuan manusianya.

Kesadaran yang demikian, sesungguhnya juga telah dimiliki bangsa Indonesia sejak awal kelahirannya. Ini terbukti dengan adanya pernyataan yang tegas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, *mencerdaskan kehidupan bangsa...* (Anshar, 1977:161).

Lebih jauh, tentang tujuan pendidikan ini dinyatakan dalam pasal 31 UUD 1945, dan diturunkan kemudian dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tujuan Pendidikan Nasional itu adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi *manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab* (UU SISDIKNAS, 2003: 12).

Tak kurang sesungguhnya undang-undang dan aturan yang menempatkan pentingnya posisi pendidikan pada bangsa ini. Namun entah mengapa, dari waktu ke waktu, sejak republik ini lahir, baik pada periode saat politik jadi panglima maupun pada saat pembangunan ekonomi jadi panglima, nasib pendidikan pada bangsa ini selalu ada di wilayah pinggiran. Pendidikan tidak pernah menjadi prioritas utama sebagai pilar yang akan mengantarkan bangsa ini sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Kondisi pendidikan Indonesia selama ini mengidap penyakit yang kronis yang akut.

Belum lagi kesadaran ini pulih sepenuhnya, tiba-tiba kita dihadapkan dengan keanehan yang kita temukan dalam tubuh bangsa ini. Sekarang ini, Amandemen atas UUD 1945 di bidang pendidikan mengamanatkan adanya alokasi 20 % dari APBN. Akan tetapi ketika Undang-Undang Dasar mengamanatkan 20 % APBN untuk bidang pendidikan, pemerintah lalu berdalih, dengan alasan kondisi ekonomi, pemenuhan alokasi tersebut akan dilakukan secara bertahap.

Namun apa daya, sampai saat ini anggaran untuk bidang pendidikan baru dalam kisaran 7-8 % saja. Atau ada kekhawatiran, apabila anggaran ini dipenuhi sesuai tuntutan undang-undang, maka akan terjadi korupsi besar-besaran di departemen ini. Kekhawatiran yang demikian bisa saja dimunculkan, karena dalam situasi sekarang, problem korupsi telah mewabah dan menjadi penyakit kronis yang diidap oleh bangsa ini.

Makna Demokrasi bagi Pelestarian Nilai-nilai Budaya

Menurut kamus, demokrasi adalah 'pemerintahan oleh rakyat di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh rakyat atau wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan bebas'. Dalam kaitan ini demokrasi adalah suatu sistem di mana warga negara bebas mengambil keputusan melalui kekuasaan mayoritas. Dari pendefinisian yang demikian bisa dilihat adanya implikasi antara lain terhadap: (a) cara pengangkatan kepala negara atau semua jajaran pejabat lembaga pemerintahan, (b) cara pengambilan keputusan tentang suatu perundang-undangan atau peraturan pemerintah.

Dalam paparan Affan Gafar, ilmu politik membagi dua macam pemahaman terhadap demokrasi: pemahaman secara normatif dan pemahaman secara empirik. Pemahaman yang disebut terakhir biasanya dikenal dengan sebutan *procedural democracy*. Dalam pemahaman secara normatif, demokrasi merupakan sesuatu yang secara ideal hendak dilakukan atau diselenggarakan oleh sebuah negara, seperti misalnya terungkap dalam pernyataan Abraham Lincoln bahwa demokrasi adalah suatu "pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat". Dari pernyataan ini bisa dinyatakan bahwa demokrasi dibangun di atas dua prinsip yaitu pemerintahan sendiri dan penetapan atau pembuatan undang-undang secara langsung oleh rakyat.

Adapun pemahaman demokrasi secara empirik (*procedural democracy*) biasanya menggunakan sejumlah indikator antara lain seberapa banyak ruang gerak yang diberikan pemerintah kepada warga negara untuk berpartisipasi. Warga negara atau rakyat (*demos*), dalam demokrasi selalu mendapatkan perhatian, bahkan terfokus padanya. Oleh karena itu, selalu ditekankan peranan warga negara yang senyatanya dalam proses politik. Dalam

demokrasi, pemerintah hanyalah salah satu unsur yang hidup berdampingan dalam suatu struktur sosial dari lembaga-lembaga yang banyak dan bervariasi: partai politik, organisasi dan asosiasi. Namun diakui bahwa yang memiliki kemufakatan dan kedaulatan adalah manusia atau rakyat.

Adanya penekanan yang demikian terfokus kepada warga negara atau rakyat, maka dalam pemerintahan yang demokrasi selalu memberikan perhatian kepada warga negaranya. Implikasi dari cara pandang yang demikian adalah pada diletakkannya pilar-pilar demokrasi yang selalu mengutamakan kepentingan warga negara. Pilar-pilar demokrasi itu adalah: (a) kedaulatan rakyat, (b) pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah (rakyat), (c) kekuasaan mayoritas, (d) hak-hak minoritas, (e) jaminan hak-hak asasi manusia, (f) pemilihan yang bebas dan jujur, (g) persamaan di depan hukum, (h) proses hukum yang wajar, (i) pembatasan pemerintah secara konstitusional, (j) pluralisme sosial, ekonomi dan politik, dan (k) nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama dan mufakat.

Demokrasi, bergantung kepada pembangunan suatu budaya warga negara yang demokratis. Budaya dalam pengertian ini adalah perilaku, praktik dan norma-norma yang menjelaskan kemampuan warga negara untuk memerintah diri sendiri. Pemerintah yang merupakan representasi warga negara dengan sendirinya juga harus memberikan kebebasan kepada setiap warga negara untuk mengejar kepentingan dan menjalankan hak-hak mereka. Mereka membuat keputusan sendiri tentang pekerjaan yang akan mereka lakukan, jenis pekerjaan yang akan dilakukan, partai politik mana yang akan diikutinya atau bahkan tidak akan terlibat dalam partai politik, dan seterusnya. Pada intinya adalah adanya 'kebebasan'.

Kebebasan dan demokrasi sering dipakai secara timbal balik, tetapi keduanya tidak sama. Demokrasi sesungguhnya adalah seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan, tetapi juga menyangkut seperangkat praktek dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah yang panjang. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa demokrasi adalah '*pelembagaan*' dari kebebasan. Oleh karena itu wajar kalau dalam perkembangan wacana demokrasi ini terkait dengan persoalan kebebasan, misalnya saja hak asasi manusia, persamaan di depan hukum, dan toleransi. Karena di dalam contoh-contoh tersebut terkandung makna kebebasan warga negara.

Dari sedikit gambaran di atas, fokus dan ruang lingkup demokrasi adalah pada persoalan kemanusiaan, dari manusia kepada manusia. Dan lebih fokus lagi adalah persoalan kekinian, duniawi. Dalam demokrasi tidak ada intervensi yang berasal dari pihak luar, di luar diri manusia, yaitu Allah Swt. Dengan demikian, dalam demokrasi tidak ada nilai-nilai yang bercorak ilahiah. Tidak ada nilai-nilai yang dipandang transendental yang abadi. Justifikasi benar dan salah yang dihasilkan dari demokrasi bercorak relatif, sangat bergantung kepada hasil kesepakatan bersama suatu masyarakat. Keputusan dan aturan yang dilembagakan sebagai hasil demokrasi tidak memiliki kemutlakan dan nilai *transenden* (spiritual). Produk aturan demokrasi semata bersifat temporal dan kekinian (duniawiah) semata.

Dalam perspektif Islam, menurut Soroush demokrasi dibagi pada dua pilar. *Pertama*, untuk menjadi orang yang benar-benar beriman, seseorang harus bebas. Keimanan atau keyakinan yang berada di bawah ancaman atau paksaan adalah bukan keimanan yang benar. Dan apabila seorang yang beriman secara bebas tunduk dan patuh, bukan berarti bahwa ia mengorbankan kebebasan. Ia juga tetap memiliki kebebasan untuk meninggalkan keyakinannya. Sangat kontradiksi apabila pada mulanya ada kebebasan untuk beriman, tetapi kemudian menghilangkan kebebasan itu. Kebebasan ini merupakan pilar (*basis*) demokrasi. Menurut Soroush keyakinan dan keinginan dari mayoritas harus membentuk negara Islam yang ideal. Demokrasi Islam bukan disuntikan dari atas; ia adalah sah apabila dirubah oleh mayoritas, termasuk orang-orang yang tidak beriman.

Kedua, pemahaman umat Islam terhadap dan tentang Islam senantiasa berkembang. Teks kitab suci tidak berubah dan tidak akan berubah, tetapi penafsiran umat Islam terhadap teks suci itu senantiasa berkembang, karena pemahaman itu dipengaruhi oleh masa dan keadaan. Lebih lanjut dikatakannya bahwa tidak ada penafsiran yang absolut dan bersifat tetap yang berlaku sepanjang waktu dan di setiap tempat. Dan bahkan menurutnya, tidak ada seorang individu atau sekelompok orang yang berhak mengklaim bahwa hanya diri dan kelompoknyalah yang memiliki otoritas untuk melakukan penafsiran terhadap ajaran agama (Sudrajat, 2006).

Ilmuwan lain yang berbicara tentang Islam dan demokrasi adalah Rachid al-Ghannouchi. Ghannouchi merupakan pemikir Islam yang lahir

dari situasi yang berkembang di Tunisia. Berbeda dengan Soroush yang berlatar belakang Syi'ah, Ghannouchi memiliki latar belakang Sunni. Dalam kaitannya dengan demokrasi ia menganjurkan suatu '*sistem yang Islami*', yang karakteristiknya adalah pemerintahan mayoritas, pemilihan yang bebas, kebebasan pers, perlindungan kepada mayoritas, adanya perlakuan yang sama terhadap semua partai (sekular dan keagamaan), dan pemenuhan hak-hak kepada kaum wanita. Peran Islam adalah memberikan suatu sistem dengan nilai-nilai moral.

Pertama, demokrasi Islam menurutnya pertama-tama sebagai hasil penafsiran terhadap kitab suci. Islam menurutnya tidak datang dengan suatu program khusus berkenaan dengan kehidupan manusia. Islam membawa prinsip-prinsip yang umum. Oleh karena itu, adalah tugas umatnya untuk memformulasikan program tersebut melalui interaksi antara prinsip-prinsip Islam dengan modernitas. Islam memberikan jaminan untuk dilakukannya *ijtihad*. Proses '*syura*' (bermusyawarah) menurutnya berarti cara pengambilan keputusan yang kembali kepada komunitas secara keseluruhan. Ditambahkannya bahwa nilai-nilai demokratik seperti '*pluralisme politik*' dan '*toleransi*' sepenuhnya kompatibel dengan Islam. Islam mengakui adanya realitas pluralisme dalam kehidupan, apakah itu yang berkaitan dengan kesukuan, kebangsaan, kebahasaan, agama, ataupun yang bercorak aliran-aliran politik.

Kedua, demokrasi Islam pada dasarnya merupakan hasil dari pengalaman manusia dewasa ini. Legitimasi negara-negara Muslim kontemporer didasarkan pada kebebasan dari kolonialisme Eropa modern, suatu kebebasan dimana unsur keagamaan dan sekuler, Muslim dan Kristen, terlibat secara bersama-sama. Oleh karena itu '*tidak ada ruang*' untuk membuat perbedaan di antara warga negara, dan persamaan yang sepenuhnya ini merupakan dasar bagi setiap masyarakat Muslim. Ia menegaskan bahwa legitimasi yang sebenarnya adalah legitimasi yang diperoleh melalui pemilihan. Menurut Islam mengutuk pemakaian agama untuk tujuan yang bersifat material atau hegemonik, seraya mengutip al-Qur'an surat al-Hujurat (49): 13 "Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu sekalian dari sepasang laki-laki dan perempuan, dan kemudian kami jadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, agar

kamu saling kenal mengenal (bukan untuk saling membenci satu sama lain)...". Ia juga menambahkan bahwa ada keseimbangan antara teks suci dan realitas manusia yang disebut dengan '*realism*' atau '*logical reasoning* atau '*aqlanah*'. '*Aqlanah* ini merupakan perkembangan yang dinamik dan terus berlangsung. Karena itu, Ghannouchi memiliki keyakinan bahwa Islam dan demokrasi merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan (Sudrajat, 2006).

Peran Pendidikan bagi Demokratisasi

Menurut Quraish Shihab baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak-hak untuk berpolitik. Ia antara lain merujuk sejumlah ayat yang dapat dijadikan dasar pendapatnya. Misalnya al-Qur'an surat Al-Taubah: 71 menyatakan "Dan orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah *awliya'* bagi yang lain. Mereka *menyuruh* untuk mengerjakan yang ma'ruf, *mencegah* yang munkar, mendirikan salat...". Kata *awliya'*, dalam pengertiannya mencakup kerja sama, bantuan, dan penguasaan; sedang dalam pengertian menyuruh yang ma'ruf menyangkut segala segi kebaikan, dan di dalamnya termasuk mengkritik atau memberi nasehat kepada penguasa. Di sisi lain al-Qur'an juga mengajak umatnya (laki-laki dan perempuan) untuk bermusyawarah seperti firmanNya "Urusan mereka (selalu) diputuskan dengan musyawarah" (QS 42: 38). Dengan demikian, laki-laki dan perempuan memiliki tanggung jawab bersama untuk membangun kehidupan politik bersama. Oleh karena itu tidak pada tempatnya kalau kemudian ada perbedaan hak sipil dan politik antara laki-laki dan perempuan.

Seiring dengan apa yang dikatakan al-Gazali di atas, apabila mencermati fenomena sosiologis masyarakat Indonesia, kita akan menemukan adanya dua kecenderungan yang saling berlawanan.

Pertama, bangsa Indonesia menyebut dirinya sebagai bangsa yang religius. Simbol-simbol untuk itu sangat jelas dan kasat mata. Kita semuanya tahu, setiap penduduk negeri ini menyatakan keagamanya dalam KTP. Pembangunan tempat ibadah terus bertambah dari waktu ke waktu. Dari tempat-tempat suci tersebut berkumandang seruan dan ajakan untuk berbuat kebaikan. Jumlah orang yang naik haji dari tahun ke tahun tidak pernah berkurang. Media massa, baik cetak maupun elektronik, senantiasa

memberikan tempat dan ruang untuk dakwah. Bahkan dalam kurun terakhir, buku-buku yang bernuansa keagamaan, kelihatan sangat menggembirakan dan banyak diminati. Para pengamat tidak akan kesulitan untuk sampai pada kesimpulan bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat agamis.

Kedua, kita menyaksikan di sana-sini adanya fenomena yang sungguh bertolak belakang dan berseberangan dengan gambaran suasana dan nuansa keagamaan di atas. Dengan mudahnya kita bisa menyaksikan perilaku sekelompok orang yang tidak mau tahu dengan segala bingkai moral. Pelanggaran moral baginya dirasakan enteng saja, sekalipun pesan-pesan agama yang sering didengarnya mengecam perilaku itu, sejak dari ancaman yang ringan sampai ke tingkat yang sangat keras dan mengerikan. Bagaimanapun kecilnya pelanggaran moral, kalau hal itu menggejala dan sampai menjadi budaya, maka ia akan dapat merapuhkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Contoh yang sangat memuakkan dan menggelisahkan dari bangsa ini adalah kecenderungan untuk berbuat korup dan menyalahgunakan kekuasaan. Sejarah Indonesia modern selama hampir lima dekade ini sarat dengan muatan korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Padahal, sekali lagi, bangsa ini dikenal sebagai bangsa yang religius dan sebagai bangsa Muslim terbesar di muka bumi. Atribut-atribut mulia dan besar ini teramat sering dihancurkan oleh perilaku korup dan penyalahgunaan kekuasaan.

Selama hampir lima dekade kita berkubang dalam budaya korup dan penyalahgunaan kekuasaan. Sila kedua dari Pancasila sungguh merana! Kita punya sila *kemanusiaan yang adil dan beradab*, tetapi perilaku sebagian kita justru menghinai nilai moral dari sila kedua ini. Nilai adil dan beradab sebegitu jauh lebih merupakan hiasan bibir dalam upacara-upacara bendera dan kenegaraan. Perbuatan korup adalah perbuatan biadab yang tidak layak dilakukan oleh warga negara dari bangsa yang beradab.

Kita memang sedang berada pada batas sejarah yang sangat kritis. Kita mengalami keguncangan tidak saja bidang ekonomi, dunia politik kita pun sejak Dekrit 5 Juli 1959 sudah mengalami kemacetan. Sistem Demokrasi Terpimpin (1959-1966) yang dijalankan Soekarno telah berakhir dengan malapetaka nasional berupa G-30-S/PKI dengan segala akibat buruk yang mengiringinya. Pada tahun 1966 tingkat inflasi kita telah mencapai angka 650%.

Kemudian datanglah sistem Orde Baru (1966-1998) yang menjadikan ekonomi sebagai panglima demi mengimbangi Orde Lama dengan politik sebagai panglimanya. Pertumbuhan ekonomi kabarnya bergerak antara 5 s.d. 8 % dengan pendapatan per kepala sebelum krisis sekitar US\$1,185. Akan tetapi, mengapa tiba-tiba terpuruk begitu saja setelah didahului oleh krisis yang dialami *bath* Thailand pada Juni 1997. Sampai hari ini belum ada satu teori ekonomi yang dapat menjelaskan secara memuaskan tentang krisis ini.

Selama kurun 60 tahun setelah kemerdekaan, paling tidak kita mengenal dua tipe dan dua orientasi kepemimpinan nasional: orientasi kekuasaan dan orientasi moral. Tipe pertama melingkar di sekitar Bung Karno dan Soeharto, sedangkan tipe kedua melingkar di sekitar Bung Hatta dan A.H. Nasution. Bung Karno dan Bung Hatta mewakili sipil, sementara Nasution dan Soeharto mewakili militer. Secara kebetulan, apabila dilihat dari latar belakang kulturalnya, Soekarno dan Soeharto berasal dari Jawa, sedangkan Hatta dan Nasution berasal dari luar Jawa.

Pada saat Hatta masih setia bersama Bung karno, moral bangsa masih berada dalam kendali, tidak sampai meluncur ke dalam jurang malapetaka. Akan tetapi, demi Hatta melepaskan jabatannya sebagai wakil presiden pada Desember 1956, Soekarno mulai ringan tangan dan main kayu. Atas nama UUD 1945, Soekarno telah tampil sebagai penguasa tunggal sampai sistem Demokrasi Terpimpin yang diciptakannya hancur berantakan pada tahun 1965/1966.

Soeharto yang tampil atas nama Demokrasi Pancasila persis mengikuti Bung Karno sebagai penguasa tunggal. Pancasila, UUD 1945, dan segala perundang-undangan umumnya ditafsirkan secara monolitik. Proyek P4 nya pun tidak membuahkan hasil. Kelebihan Soeharto adalah karena dapat bertahan selama 32 tahun.

Semula diharapkan A.H. Nasution dengan kekuatan moralnya akan dapat mengimbangi Soeharto dengan orientasi kekuasaannya yang luar biasa. Akan tetapi, sejak tahun 1968, bekas Ketua MPRS ini, secara sistematis disingkirkan oleh mesin kekuasaan yang dibangun aliansi Soeharto-Ali Moertopo beserta kroninya. Suatu kali Nasution pernah mengatakan bahwa teman-temannya telah mengidap penyakit rakus, baik dalam politik maupun

ekonomi.

Sayang, tokoh-tokoh moralis seperti Hatta-Nasution dan para pendukungnya tidak berdaya menghadapi mesin kekuasaan yang dibangun Soekarno-Soeharto. Secara kebetulan, dua orang yang disebut terakhir, membangun kekuasaannya di atas landasan kultur yang feodalistik. Kini, kedua mesin kekuasaan itu telah berantakan dengan menyisakan sederet masalah yang sangat rumit dan pelik. Hampir-hampir bangsa ini meluncur ke tubir jurang kehancuran total, baik politik maupun ekonomi.

Pertanyaan yang mendesak kemudian adalah, *how to save the future of this nation politically, economically, and morally?* Jawaban sederhana yang dapat saya kemukakan adalah bahwa sistem kekuasaan wajib ditegakkan di atas landasan moral yang kukuh. Tanpa moral, kekuasaan pasti akan destruktif. Dalam perspektif ini, kekuatan moral bangsa tidak boleh menyerah pada mesin kekuasaan yang a moral. Untuk menguatkan fondasi moral, salah satu jalan yang dapat ditempuh adalah dengan memberi penguatan pada bidang pendidikan.

Pendidikan dan Kesalehan Sosial

Harapan yang masih tersisa dari bangsa ini, sehingga bisa lepas dari berbagai krisis, mungkin juga adzab, adalah dengan memperbaiki sistem pendidikan. Karena melalui pendidikan, anak-anak pemilik masa depan bangsa ini, diharapkan dapat belajar dari kesalahan yang diperbuat bapak-bapak mereka. Pendidikan yang dimaksudkan di sini tentu saja seperti yang tertuang dalam tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi *manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab*.

Untuk melihat masalah pendidikan, moral, dan bangsa ini, ada baiknya dikemukakan apa yang dikatakan beberapa pemikir Muslim. Al-Farabi misalnya, ia berpendapat, bahwa untuk suatu Negara Utama (*Madinah al-Fadhilah*), bentuk negara yang dicita-citakannya, ia mengharuskan adanya perpaduan antara ilmu pengetahuan dengan agama, perpaduan antara kecerdasan akal dengan keluhuran sifat-sifat kenabian (*al-'Aqlu wa al-Nubuwwah*). Dikatakannya bahwa setiap warga negara harus memiliki

kecerdasan akal yang dituntun oleh jiwa keagamaan.

Sementara itu Ibnu Sina menekankan pendidikan anak-anak dengan akhlak yang utama, supaya mereka tumbuh dan berkembang menjadi pemuda dan menjadi dewasa dengan sifat-sifat yang terpuji. Adapun Ibn Khaldun menginginkan pertumbuhan individu yang cerdas dan bertanggung jawab, baik terhadap diri dan Tuhannya, terhadap keluarganya, dan terhadap masyarakat dan negaranya.

Seirama dengan pemikir lain, al-Gazali mengatakan, betapa besarnya bencana yang akan menimpa dan mengancam hidup manusia apabila ilmu pengetahuan tidak memiliki moral. Ilmu pengetahuan tanpa moral inilah yang ia katakan sebagai *ethical-nihilism* atau *value-nihilism*. Pada hakekatnya, segala ilmu adalah terpuji (*mahmud*), demikian dikatakan al-Gazali. Tetapi, ilmu pengetahuan itu berubah sifatnya menjadi tercela (*mazmum*), kalau penggunaannya tidak lagi mengenal batas-batas moral dan peri kemanusiaan.

Jalan untuk menghindari bencana-bencana kehidupan di atas, seperti dikatakan al-Gazali adalah melalui pendidikan. Mustafa Amien, dalam bukunya *Tarikh al-Tarbiyah*, mengutip kata bersayap yang disampaikan al-Gazali mengenai pendidikan: "Jika ibu-bapak mendidik anak-anaknya supaya terpelihara dari neraka dunia, maka memeliharanya dari neraka akhirat adalah lebih perlu lagi, yaitu dengan mendidik, melatih, dan mengajarnya akan akhlak yang mulia.

Pendidikan harus ditanamkan semenjak dini, dengan memperhatikan kepentingan jasmaniyah, aqliyah, dan khuluqiyahnya. Pendidikan harus mengarahkan pada tercapainya kesehatan jasmani, kecerdasan akal, dan pembentukan karakter dan moral. Dengan teori pendidikannya, al-Gazali mencita-citakan manusia-baru yang utama, manusia yang sehat jasmaninya, cerdas akalnya, dan anggun dalam perilaku moralnya.

Seiring dengan konsep di atas, akhir-akhir ini, pada dunia pendidikan kita telah dan sedang diperkenalkan gagasan tentang kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang berbasis kompetensi. Kompetensi yang dimaksudkan di sini adalah perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Menurut Gordon, beberapa aspek yang terkandung dalam konsep kompetensi adalah aspek pengetahuan (*knowledge*), pemahaman (*understanding*), kemampuan

(skills), nilai (value), sikap (attitude), dan minat (interest) (Mulyana, 2003: 38-39).

Pengembangan Kurikulum di atas mempertimbangkan prinsip-prinsip: (1) peningkatan keimanan, budi pekerti luhur, dan nilai-nilai budaya, (2) keseimbangan etika, logika, estetika, dan kinestetika, (3) penguatan integrasi nasional, (4) perkembangan pengetahuan dan teknologi informasi, (5) pengembangan kecakapan hidup (*life skills: personal skills, thinking skills, social skills, academic skills, dan vocational skills*), (6) pilar pendidikan (*learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together*), (7) komprehensif dan berkesinambungan, (8) belajar sepanjang hayat, dan (9) diversifikasi kurikulum (Draft Kurikulum 2004, 2-3).

Gagasan ini bukanlah kreasi asli bangsa kita, melainkan disadap dari Barat yang diperkenalkan sejak 20 tahun lalu. Tidak ada yang salah dalam penyadapan ini, asal dilakukan secara bertanggung jawab dan sungguh-sungguh dengan tidak mengabaikan kondisi lingkungan setempat yang telah lama rusak. Penyiapan guru/dosen untuk merealisasikan gagasan ini harus dilakukan melalui perencanaan yang baik dan terukur.

Filosofi pendidikan kita dan kurikulum 2004 ini, jelas memberi porsi yang berimbang bagi konsumsi otak dan hati. Keberimbangan ini harus menjadi acuan dan referensi dalam proses pembelajaran dalam pendidikan kita. Karena yang diperlukan untuk pembangunan manusia pada masa-masa yang akan datang adalah agar filosofi ini menyatu dengan seluruh sistem pendidikan kita hingga dapat membentuk kepribadian bangsa yang utuh. Betapa mulianya apabila pendidikan kita betul-betul diarahkan untuk membangun manusia seutuhnya. Karena dimensi ini menyangkut proses pencerdasan otak dan pencerahan kalbu.

Kelemahan selama ini adalah karena kita sering berhenti pada tahap verbal, tidak menghujam ke lubuk hati yang terdalam. Akibatnya, kita tetap saja menjadi bangsa yang serba superfisial dan gagap. Di sinilah tantangan terbesar bagi dunia pendidikan kita, yaitu agar verbalisme tidak lagi menipu kita, hingga kita kehilangan sesuatu yang mendasar, yaitu kecerdasan dan kepekaan hati nurani. Di samping itu, pencerdasan otak sebagai dimensi kognitif sudah lama tercemar oleh budaya politik yang serbahegemonik dan otoritarian. Akibatnya teramat parah, otak manusia Indonesia telah menjadi

kecerdasan akal yang dituntun oleh jiwa keagamaan.

Sementara itu Ibnu Sina menekankan pendidikan anak-anak dengan akhlak yang utama, supaya mereka tumbuh dan berkembang menjadi pemuda dan menjadi dewasa dengan sifat-sifat yang terpuji. Adapun Ibn Khaldun menginginkan pertumbuhan individu yang cerdas dan bertanggung jawab, baik terhadap diri dan Tuhannya, terhadap keluarganya, dan terhadap masyarakat dan negaranya.

Seirama dengan pemikir lain, al-Gazali mengatakan, betapa besarnya bencana yang akan menimpa dan mengancam hidup manusia apabila ilmu pengetahuan tidak memiliki moral. Ilmu pengetahuan tanpa moral inilah yang ia katakan sebagai *ethical-nihilism* atau *value-nihilism*. Pada hakekatnya, segala ilmu adalah terpuji (*mahmud*), demikian dikatakan al-Gazali. Tetapi, ilmu pengetahuan itu berubah sifatnya menjadi tercela (*mazmum*), kalau penggunaannya tidak lagi mengenal batas-batas moral dan peri kemanusiaan.

Jalan untuk menghindari bencana-bencana kehidupan di atas, seperti dikatakan al-Gazali adalah melalui pendidikan. Mustafa Amien, dalam bukunya *Tarikh al-Tarbiyah*, mengutip kata bersayap yang disampaikan al-Gazali mengenai pendidikan: "Jika ibu-bapak mendidik anak-anaknya supaya terpelihara dari neraka dunia, maka memeliharanya dari neraka akhirat adalah lebih perlu lagi, yaitu dengan mendidik, melatih, dan mengajarnya akan akhlak yang mulia.

Pendidikan harus ditanamkan semenjak dini, dengan memperhatikan kepentingan *jasmaniyah*, *aqliyah*, dan *khuluqiyahnya*. Pendidikan harus mengarahkan pada tercapainya kesehatan jasmani, kecerdasan akal, dan pembentukan karakter dan moral. Dengan teori pendidikannya, al-Gazali mencita-citakan manusia-baru yang utama, manusia yang sehat jasmaninya, cerdas akalnya, dan anggun dalam perilaku moralnya.

Seiring dengan konsep di atas, akhir-akhir ini, pada dunia pendidikan kita telah dan sedang diperkenalkan gagasan tentang kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang berbasis kompetensi. Kompetensi yang dimaksudkan di sini adalah perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Menurut Gordon, beberapa aspek yang terkandung dalam konsep kompetensi adalah aspek pengetahuan (*knowledge*), pemahaman (*understanding*), kemampuan

(skills), nilai (value), sikap (attitude), dan minat (interest) (Mulyana, 2003: 38-39).

Pengembangan Kurikulum di atas mempertimbangkan prinsip-prinsip: (1) peningkatan keimanan, budi pekerti luhur, dan nilai-nilai budaya, (2) keseimbangan etika, logika, estetika, dan kinestetika, (3) penguatan integrasi nasional, (4) perkembangan pengetahuan dan teknologi informasi, (5) pengembangan kecakapan hidup (*life skills: personal skills, thinking skills, social skills, academic skills, dan vocational skills*), (6) pilar pendidikan (*learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together*), (7) komprehensif dan berkesinambungan, (8) belajar sepanjang hayat, dan (9) diversifikasi kurikulum (Draft Kurikulum 2004, 2-3).

Gagasan ini bukanlah kreasi asli bangsa kita, melainkan disadap dari Barat yang diperkenalkan sejak 20 tahun lalu. Tidak ada yang salah dalam penyadapan ini, asal dilakukan secara bertanggung jawab dan sungguh-sungguh dengan tidak mengabaikan kondisi lingkungan setempat yang telah lama rusak. Penyiapan guru/dosen untuk merealisasikan gagasan ini harus dilakukan melalui perencanaan yang baik dan terukur.

Filosofi pendidikan kita dan kurikulum 2004 ini, jelas memberi porsi yang berimbang bagi konsumsi otak dan hati. Keberimbangan ini harus menjadi acuan dan referensi dalam proses pembelajaran dalam pendidikan kita. Karena yang diperlukan untuk pembangunan manusia pada masa-masa yang akan datang adalah agar filosofi ini menyatu dengan seluruh sistem pendidikan kita hingga dapat membentuk kepribadian bangsa yang utuh. Betapa mulianya apabila pendidikan kita betul-betul diarahkan untuk membangun manusia seutuhnya. Karena dimensi ini menyangkut proses pencerdasan otak dan pencerahan kalbu.

Kelemahan selama ini adalah karena kita sering berhenti pada tahap verbal, tidak menghujam ke lubuk hati yang terdalam. Akibatnya, kita tetap saja menjadi bangsa yang serba superfisial dan gagap. Di sinilah tantangan terbesar bagi dunia pendidikan kita, yaitu agar verbalisme tidak lagi menipu kita, hingga kita kehilangan sesuatu yang mendasar, yaitu kecerdasan dan kepekaan hati nurani. Di samping itu, pencerdasan otak sebagai dimensi kognitif sudah lama tercemar oleh budaya politik yang serbahegemonik dan otoritarian. Akibatnya teramat parah, otak manusia Indonesia telah menjadi

tawanan kepentingan politik sesaat melalui berbagai bentuk indoktrinasi yang melelahkan, jika bukan melumpuhkan.

Jika proses pencerdasan otak telah lama terbelenggu, proses pencerahan kalbu juga tidak kurang merananya. Ditemukan adanya sumbatan-sumbatan kuat yang menyebabkan tidak lancarnya aliran energi yang dapat memberikan pencerahan atas kalbu anak bangsa ini. Di satu pihak, pendidikan formal dan non-formal berusaha keras menjaga keberimbangan antara konsumsi otak dan hati. Mereka berusaha keras untuk menjadi panjaga-penjaga moralitas. Tetapi di lain pihak, tontonan yang disuguhkan setiap hari di panggung politik dan sinema elektronik kita, menyajikan tontonan yang dipenuhi kemunafikan, kerakusan, keserakahan, kekerasan, keseronokan dan takhayul.

Para pendidik haruslah menunjukkan kemampuan yang prima untuk melihat realitas moral bangsa yang gelap ini secara tajam. Para pendidik harus turut serta mencari solusi-solusi yang realistis dan arif agar dapat keluar secepatnya dari suasana kepengapan dan kegelapan ini. Departemen Pendidikan Nasional sebagai pengawal proses pencerdasan bangsa hendaknya lebih tanggap terhadap tuntutan bangsa ke depan. Pada saat yang sama Departemen Agama yang seharusnya berfungsi sebagai pengawal moral dan proses pencerahan bangsa, tidak malah menjadi pusat intrik politik golongan.

Menurut al-Gazali, sifat-sifat buruk yang melekat dalam diri seseorang harus dilawan dengan ilmu dan amal. Unsur pengetahuan (*'ilm*) sangat komprehensif. Ini menyangkut sifat dari tabiat buruk, penyebabnya dan akibat yang merugikannya. Pengetahuan tentang kerugian yang ditimbulkan oleh tabiat buruk ini harus demikian pasti. Pengetahuan seperti ini akan menimbulkan kebencian yang kuat pada sifat-sifat buruk tersebut. Melawan keburukan dengan pengetahuan ini, oleh al-Gazali disebut *'ilaj 'ilmi* (obat kognitif).

Menurutnya, pengetahuan ini, akan punya efek pula terhadap muncul dan timbulnya keinginan untuk melawan penyebab tersebut dengan langkah-langkah amal. Beramal dengan tekun harus dilakukan untuk membuang pengaruh sifat-sifat buruk, sehingga akibat amal tersebut akan mengimbangi penyebab sifat-sifat buruk itu. Amalan ini juga harus berlawanan dengan

perbuatan yang timbul dari sifat-sifat buruk itu. Penghapusan sifat-sifat buruk dengan bantuan perbuatan amal ini dinamakan al-Gazali sebagai 'ilaj 'amali (obat praktis).

Karena amal yang dilakukan bertentangan dengan kehendak nafsu seseorang, maka diperlukan kesabaran (*shabr*) yang tinggi. Memang tanpa kesabaran tidak mungkin ada penyembuhan. Kombinasi-tiga unsur (*arkan*), yaitu ilmu, amal, dan sabar inilah yang akan dapat menghapuskan sifat-sifat buruk dalam diri manusia (Quasem, 1988: 99).

Ilmu inilah yang harus menjadi perhatian para guru dan dosen. Para guru dan dosen mempunyai tanggung jawab untuk memberikan penjelasan-penjelasan yang masuk akal dan rasional tentang implikasi setiap perbuatan. Apakah perbuatan itu berimplikasi buruk atau baik, baik untuk diri sendiri atau orang lain. Bagi al-Gazali, rasio merupakan sarana untuk meraih kebahagiaan di dunia-ini dan dunia yang akan datang (Abdullah, 2002:114). Melalui pendekatan yang ilmiah ini, seseorang diharapkan akan sampai dan mencapai kesadaran moralnya. Pendekatan semacam ini dapat dikatakan sebagai pengembangan moral yang bersifat kognitif.

Ketika pikiran logis ini menyertai perbuatan setiap orang, *insyaallah* ia akan dapat mengontrol setiap perbuatannya. Karena itulah misalnya, ajaran Islam sangat menekankan pentingnya niat dalam setiap perbuatan. Niat, dengan sendirinya berarti adanya kesadaran atas perbuatan itu dan sekaligus menempatkan perbuatan itu di bawah kontrol Allah. Melalui niat, seseorang dengan demikian membangun kesadaran ketuhanan dalam setiap perbuatannya. Niat karena itu akan menjaga moralitas seseorang, itulah fungsi niat dalam setiap perbuatan

Akhirnya, tugas untuk melakukan pencerdasan otak dan pencerahan moral adalah tanggung jawab semua pihak. Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama memang memiliki tanggung jawab untuk memikul amanat ini. Tetapi lebih dari itu, perilaku para elit politik dan juga karya para pekerja seni, harus mendukung bagi berkembangnya moral baik. Karena bagaimanapun, perilaku para elit dan hasil kerja para pekerja seni merupakan pendidikan yang langsung ditatap, diserap, dan bahkan ditiru. Di akhir kata, kita tidak boleh menyerah pada kepengapan dan kebobrokan ini. *We must do something strategic and decisive now, or never!*

Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Pendidikan merupakan pilar yang sangat penting bagi teguh dan kokohnya suatu bangsa. Pendidikan adalah suatu proses panjang dalam rangka mengantarkan manusianya untuk menjadi seorang yang memiliki kekuatan intelektual dan spiritual, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidupnya di segala aspek dan menjalani kehidupan yang bercita-cita dan bertujuan pasti. Hal ini harus menjadi suatu garisan pokok dalam setiap proses pembangunan suatu bangsa.
2. Krisis moral yang berkembang dalam suatu bangsa, secara keseluruhan akan sangat membahayakan kelangsungan hidup bangsa tersebut. Bahaya itu antara lain munculnya budaya rakus dan korup. Apabila suatu bangsa sudah mengidap penyakit ini maka akan bermunculan orang-orang yang menggunakan dan menghalalkan segala cara untuk memperturutkan nafsu hewannya dan tujuan yang diinginkannya.
3. Tugas untuk melakukan pencerdasan otak dan pencerahan moral adalah tanggung jawab semua pihak. Namun, para pendidik secara spesifik memiliki tugas khusus, yaitu harus menunjukkan kemampuan yang prima untuk melihat realitas moral bangsa yang gelap ini secara tajam. Para pendidik harus turut serta mencari solusi-solusi yang realistis dan arif agar bangsa ini tidak terjerumus ke dalam jurang kehancuran dan segera lepas dari suasana kepengapan dan kegelapan. Sifat-sifat buruk yang melekat dalam diri seseorang harus dilawan dengan ilmu dan amal. Ilmu, dengan semua disiplinnya, harus menjadi alat bagi para pendidik untuk membangun moralitas bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin. (2002). *Filsafat Etika Islam*. Bandung: Mizan.
- Ahmad, Zainal Abidin (1975). *Konsepsi Negara Bermoral*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Anshari, Endang Saifuddin. (1997). *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 Sebuah Konsensus Nasional*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Maarif, A. Syafii (2004). *Mencari Autentisitas dalm Kegalauan*. Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban Muhammadiyah.
- Maarif, A. Syafii, dalam Muslih Usa dan Aden Wijdan (ed.). (1977) *Pendidikan Islam dalam Peradaban Industrial*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Mulyana, E.. (2003). *Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Quasem, M. Abul. (1988). *Etika Al-Ghazali*. Bandung: Pustaka.
- Undang-Undang NO. 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS dan Penjelasannya. (2003). Jakarta: Media Wacana.
- William M. Kurtines dan Jacob L. Gerwitz. (1992). *Moralitas, Perilaku Moral, dan Perkembangan Moral*. Jakarta: UI Press.